



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TRIWULAN 1

2026

**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Triwulan I Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol selama periode Triwulan I Tahun 2026, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Di samping itu, laporan ini juga menjadi sarana untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja organisasi dalam mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas politik, ketahanan nasional, serta pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat berbagai tantangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, melalui laporan ini diharapkan dapat diperoleh masukan yang konstruktif guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

Akhir kata, kami berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Malili, April 2026

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR**

Kepala Badan,



SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690403 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Gambaran Umum Badan Kesbangpol	4
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.4.2. Struktur Organisasi	8
1.4.3. Sumber Daya	9
1.4.3.1. Sumber Daya Manusia	9
1.4.3.2. Sarana dan Prasarana	12
1.5. Isu-Isu Strategis	16
1.6. Sistematika Penulisan	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN	19
2.1. Rencana Strategis	19
2.1.1. Visi	19
2.1.2. Misi	20
2.1.3. Tujuan dan sasaran	20
2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.2. Indikator Kinerja Utama	22
2.3. Strategi program dan kegiatan	23
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2026	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Badan Kesbangpol	31
Sasaran Strategis -1	32
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2026 (Triwulan -1)	32
2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026 (Triwulan – 1) dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	33

3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2026 (Triwulan-1) dengan Target Jangka Menengah.....	34
4.	Perbandingan dengan Target Nasional atau Daerah Lain ..	35
5.	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	35
6.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	38
	Sasaran Strategis -2	51
1.	Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2026 (Triwulan -1)	51
2.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026 (Triwulan – 1) dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	53
3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2026 (Triwulan-1) dengan Target Jangka Menengah.....	54
4.	Perbandingan dengan Target Nasional atau Daerah Lain ..	55
5.	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	56
6.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	58
	Sasaran Strategis -3	61
1.	Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2026 (Triwulan -1)	61
2.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026 (Triwulan – 1) dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	62
3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2026 (Triwulan-1) dengan Target Jangka Menengah.....	63
4.	Perbandingan dengan Target Nasional atau Daerah Lain ..	63
5.	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	64
6.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	66

Sasaran Strategis -4	69
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2026 (Triwulan -1)	69
2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026 (Triwulan – 1) dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	70
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2026 (Triwulan-1) dengan Target Jangka Menengah.....	71
4. Perbandingan dengan Target Nasional atau Daerah Lain ..	72
5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	72
6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	73
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran	75
3.5. Realisasi Anggaran	84
BAB IV PENUTUP	104
4.2. Kesimpulan	104
4.1. Saran / Rekomendasi.....	105
Lampiran – Lampiran	
- Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja (LKj) Triwulan 4 Tahun 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kerangka tersebut, setiap instansi pemerintah dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kerjanya secara terukur dan berorientasi pada hasil.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan ini menjadi landasan utama dalam penerapan manajemen kinerja pemerintahan yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja. Ketentuan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas ini menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ideologi, politik, sosial, budaya, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Kesbangpol berperan dalam pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan nilai-nilai Pancasila dan

Bhinneka Tunggal Ika, peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan partai politik, serta pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut memerlukan perencanaan dan pengelolaan kinerja yang sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kabupaten Luwu Timur memiliki karakteristik wilayah dan masyarakat yang majemuk dengan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang dalam menjaga stabilitas daerah sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan daerah, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tidak hanya berpedoman pada visi dan misi daerah, tetapi juga harus selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan pada tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan 1 Tahun 2026. Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 yang telah disusun untuk mendukung arah kebijakan pembangunan daerah pada periode selanjutnya.

Selain sebagai instrumen pertanggungjawaban, LKjIP juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dan umpan balik dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Badan Kesbangpol di masa mendatang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyusunan LKjIP juga diharapkan dapat mendorong keterbukaan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Triwulan 1 Tahun 2026 merupakan wujud komitmen instansi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja, sekaligus sebagai dasar penilaian

atas capaian kinerja yang meliputi visi, misi, sasaran strategis, dan realisasi Indikator Kinerja Utama, guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44270);
3. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Triwulan 1 Tahun 2026 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan selama triwulan 1 Tahun Anggaran 2026. LKjIP ini disusun sebagai implementasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai instrumen evaluasi kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur 2025–2029

1.3.2 TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Triwulan 1 Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi capaian kinerja secara terukur dan akuntabel.
2. Menilai pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Mewujudkan pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan.
4. Menjadi bahan evaluasi dan dasar peningkatan kinerja pada periode berikutnya

1.4. GAMBARAN UMUM BADAN KESBANGPOL

1.4.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur melaksanakan urusan pemerintahan umum, bukan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di daerah dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota. Dalam pelaksanaannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ruang lingkup urusan pemerintahan umum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka penguatan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, antarumat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan.
4. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan di daerah dalam rangka penyelesaian permasalahan yang timbul.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Sehubungan dengan belum ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

4. Pelaksanaan pelayanan administrasi serta pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021. Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menerapkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara **berAKHLAK** sebagai pedoman perilaku dan budaya kerja aparatur, yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan

Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan rekomendasi izin kegiatan, fasilitasi kegiatan kemasyarakatan, serta penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan. Pelayanan dilakukan dengan mengedepankan sikap sopan, responsif, serta memberikan informasi yang jelas dan terbuka. Selain itu, Badan Kesbangpol terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan layanan berbasis digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

2. Akuntabel

Nilai Akuntabel diterapkan dengan memastikan setiap proses pelayanan dilaksanakan secara transparan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang berlaku. Setiap

aparatur bertanggung jawab atas tugas yang dilaksanakan, mulai dari proses administrasi hingga pengambilan keputusan, serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Pelaporan kegiatan dan penggunaan anggaran dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kompeten

Nilai Kompeten diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan data organisasi kemasyarakatan, serta pemahaman regulasi di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dengan aparatur yang kompeten, pelayanan dapat diberikan secara tepat, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

4. Harmonis

Nilai Harmonis diterapkan dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling menghargai, dan menjunjung tinggi toleransi antarpegawai. Selain itu, Badan Kesbangpol menjalin hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan instansi terkait, guna menciptakan suasana kerja sama yang harmonis dalam menjaga stabilitas dan kerukunan masyarakat.

5. Loyal

Nilai Loyal diwujudkan melalui dedikasi dan komitmen aparatur dalam mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah di atas kepentingan pribadi atau golongan. Aparatur melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan arahan pimpinan, kebijakan pemerintah, serta standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga netralitas dan stabilitas politik di daerah.

6. Adaptif

Nilai Adaptif diterapkan dengan kemampuan aparatur untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kerja dan perkembangan teknologi. Badan Kesbangpol mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan, seperti penyederhanaan prosedur, pemanfaatan aplikasi digital, serta peningkatan kecepatan layanan, agar dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

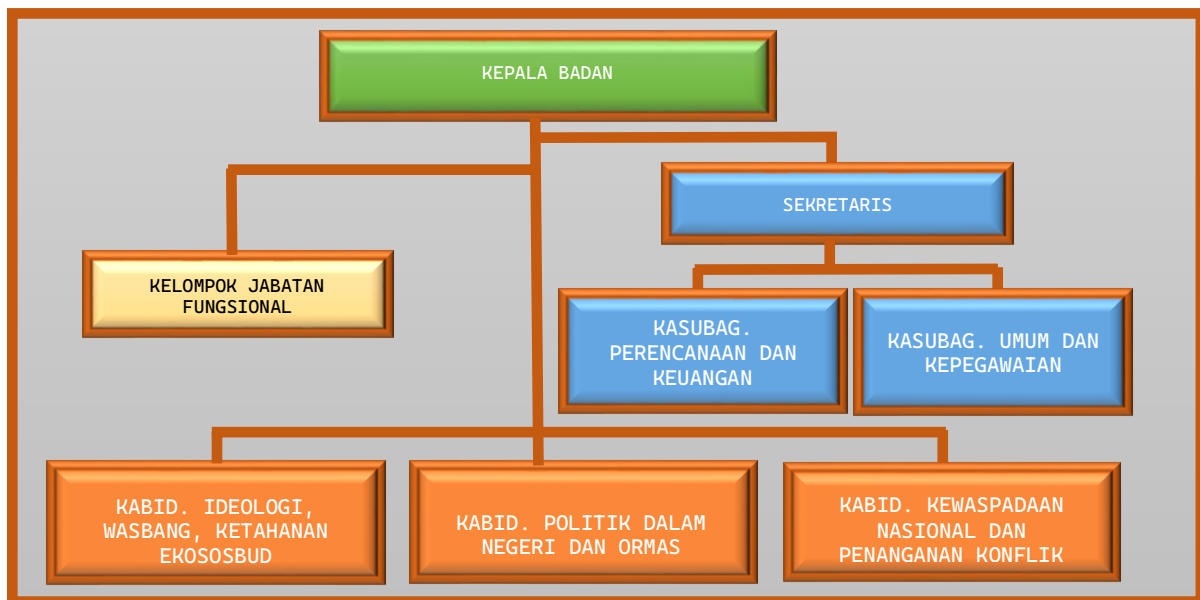
7. Kolaboratif

Nilai Kolaboratif diwujudkan melalui kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak, baik perangkat daerah, instansi vertikal, aparat keamanan, maupun elemen masyarakat. Kolaborasi ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas politik dan sosial, pencegahan dan penanganan konflik sosial, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan.

1.4.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretaris, para Kepala Bidang dan para kepala sub bagian sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi berikut

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Kesbangpol
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2021



1.4.3. SUMBER DAYA KESBANGPOL

1.4.3.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang berperan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada Triwulan 1 Tahun 2026, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur didukung oleh aparatur dan personel sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, yang terdiri atas 11 (sebelas) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 (dua) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 11 (sebelas) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, serta 3 (tiga) orang tenaga Non-ASN, yang terdiri dari 2 (dua) orang petugas kebersihan (cleaning service) dan 1 (satu) orang pengemudi.

Ketersediaan sumber daya manusia tersebut menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Secara lebih rinci data kepegawaian dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, kualifikasi Pendidikan, kepangkatan, serta berdasarkan jabatan struktural. Data sebagaimana dimaksud disajikan dalam tabel-tabel berikut :

A. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	
		Orang	%
1.	Laki-Laki	12	43
2.	Perempuan	16	57
Total		28	100

Sumber : Bagian Umum dan Kepagawaian Badan Kesbangpol

Berdasarkan Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, yang terdiri atas 12 (dua belas) orang atau 43% berjenis kelamin laki-laki dan 16 (enam belas) orang atau 57% berjenis kelamin perempuan.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai relatif berimbang dengan proporsi pegawai perempuan yang sedikit lebih dominan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Keseimbangan tersebut menjadi potensi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat.

B. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1.	Strata Dua (S-2)	3	1	4
2.	Strata Satu (S-1)	6	14	20
3.	SMA/Sederajat	2	1	3
4.	SD/Sederajat	1	0	1
Jumlah		12	16	28

Sumber : Bagian Umum dan Kepagawaian Badan Kesbangpol

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebanyak 28 orang dengan dominasi kualifikasi pendidikan Strata Satu (S-1) sebanyak 20 orang (71,43%), yang terdiri atas 6 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Selanjutnya, pegawai dengan kualifikasi Strata Dua (S-2) berjumlah 4 orang (14,29%), terdiri atas 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Pegawai dengan kualifikasi SMA/ sederajat berjumlah 3 orang (10,71%), sedangkan pegawai dengan kualifikasi SD/ sederajat berjumlah 1 orang (3,57%). Komposisi tingkat pendidikan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah memiliki pendidikan tinggi, sehingga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan profesionalisme aparatur dan kualitas pelaksanaan tugas serta fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

C. Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Jenis Kelamin	Gol. IV	Gol. III	Gol. IX (P3K)	Gol. VIII (P3K Paruh Waktu)
1.	Laki-Laki	3	2	4	1
2.	Perempuan	3	5	7	0
Jumlah		6	7	11	1

Sumber : Bagian Umum dan Kepagawaian Badan Kesbangpol

Berdasarkan Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan, komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Luwu Timur pada Tahun 2025 tersebar pada beberapa golongan kepangkatan. Pegawai dengan Golongan IV berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri atas 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. Pegawai dengan Golongan III berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas 2 (dua) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan.

Selanjutnya, pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Golongan IX berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas 4 (empat) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan. Sementara itu, pegawai dengan status PPPK Paruh Waktu Golongan VIII berjumlah 1 (satu) orang, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.

Komposisi golongan kepangkatan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur berada pada Golongan III dan Golongan IX (PPPK), yang mencerminkan struktur kepegawaian yang produktif dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi secara optimal.

C. Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon

Selanjutnya komposisi pegawai (ASN) berdasarkan Jabatan Struktural / Eselonisasi dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel. 1.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon

No.	Jabatan Struktural	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II-B	1 Orang	-	1 Orang
2.	Eselon III-A	-	1 Orang	1 Orang
3.	Eselon III-B	1 Orang	2 Orang	3 Orang
4.	Eselon IV-A	1 Orang	1 Orang	2 Orang
5.	Fungsional	-	-	0 Orang
Jumlah		3 Orang	4 Orang	7 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol

Tabel 1.4 menggambarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural/eselon sebanyak 7 orang, terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan, yang menunjukkan keterwakilan perempuan sedikit lebih tinggi dalam struktur organisasi.

Jabatan Eselon II-B diisi oleh 1 laki-laki sebagai pimpinan perangkat daerah. Pada Eselon III-A terdapat 1 perempuan, sedangkan Eselon III-B berjumlah 3 orang (1

laki-laki dan 2 perempuan). Untuk Eselon IV-A terdapat 2 orang, masing-masing 1 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara itu, jabatan fungsional belum terisi.

Secara umum, formasi jabatan struktural telah terpenuhi untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi, namun pengisian jabatan fungsional masih perlu menjadi perhatian guna memperkuat kapasitas kelembagaan.

1.4.3.2. SARANA DAN PRASARANA

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Kondisi sarana dan prasarana kerja yang sekaligus aset perlengkapan yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sampai dengan triwulan 1 tahun 2026 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 1.5
Daftar Sarana/Prasarana Kantor dan Kondisinya
Per 31 Maret 2026

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Software	1 Unit	Baik
2	AC. Window	1 Unit	Rusak Berat/Usang
3	Camera Video	1 Unit	Rusak Berat/Usang
4	Digital Audio Taperecorder	1 Unit	Rusak Berat/Usang
5	Dispenser	1 Unit	Rusak Berat/Usang
6	Facsimile	2 Unit	Rusak Berat/Usang
7	Filing Cabinet Besi	2 Unit	Rusak Berat/Usang
8	Gordyin/Kray	37 Buah	Rusak Berat/Usang
9	Handy Camp	1 Unit	Rusak Berat/Usang
10	Handy Talky (HT)	2 Unit	Rusak Berat/Usang
11	Hard Disk	3 Unit	Rusak Berat/Usang
12	Kipas Angin	2 Unit	Rusak Berat/Usang
13	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	2 buah	Rusak Berat/Usang
14	Kursi Putar	3 buah	Rusak Berat/Usang
15	Kursi Rapat	5 buah	Rusak Berat/Usang
16	Kursi Tamu	1 Buah	Rusak Berat/Usang
17	Laptop	4 Unit	Rusak Berat/Usang
18	Layar Film/Projector	1 Unit	Rusak Berat/Usang
19	Lemari Kayu	1 buah	Rusak Berat/Usang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
20	Lensa Kamera	1 Unit	Rusak Berat/Usang
21	Meja 1/2 Biro	1 buah	Rusak Berat/Usang
22	Mesin Absensi	1 Unit	Rusak Berat/Usang
23	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	1 Unit	Rusak Berat/Usang
24	Mesin Ketik Manual Standar (14-16 Inchi)	3 Unit	Rusak Berat/Usang
25	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	Rusak Berat/Usang
26	Micro Film	1 Unit	Rusak Berat/Usang
27	Note Book	1 Unit	Rusak Berat/Usang
28	P.C Unit	3 Unit	Rusak Berat/Usang
29	Papan Pengumuman	3 Buah	Rusak Berat/Usang
30	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1 Unit	Rusak Berat/Usang
31	Pesawat Telephone	1 Unit	Rusak Berat/Usang
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8 Unit	Rusak Berat/Usang
33	Uninterrupted Power Supply (UPS)	4 Unit	Rusak Berat/Usang
34	Wireless	1 Unit	Rusak Berat/Usang
35	P.C Unit	3 Unit	Rusak Berat/Usang
36	Laptop	27 Unit	4 Unit rusak Berat, 23 Unit Baik
37	Note Book	1 Unit	Rusak Berat/Usang
38	Tablet PC	1 Unit	Baik
39	Hard Disk	1 Unit	Baik
40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16 Unit	8 Unit Rusak Berat, 8 Unit Baik
41	External/Portable hardisk	2 Unit	Baik
42	Peralatan Jaringan Lainnya	1 Unit	Baik
43	Station Wagon	9 Buah	Baik
44	Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 Orang)	1 Unit	Baik
45	Mini Bus (penumpang 14 Orang Ke bawah)	2 Unit	Baik
46	Sepeda Motor	3 Unit	Baik
47	Scanner (Universal Tester)	1 Unit	Baik
48	Lemari besi/Metal	4 Buah	Baik
49	Lemari Kayu	5 Buah	1 Buah Rusak Berat, 4 Buah Baik
50	Rak Besi	1 Buah	Baik

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
51	Rak Kayu	1 Buah	Baik
52	Filing Cabinet Besi	9 Buah	2 Unit Rusak Berat, 7 Unit Baik
53	Brankas	2 Unit	Baik
54	Lemari Kaca	2 Buah	Baik
55	CCTV - Camera Control Television System	8 Unit	Rusak Berat
56	LCD Projector/Infocus	1 Unit	Baik
57	Papan Pengumuman	20 Buah	3 Buah Rusak Berat, 17 Buah Baik
58	Teralis	71 Buah	Baik
59	Alat Kantor Lainnya	1 Buah	Baik
60	Meja Kerja kayu	3 Buah	Baik
61	Kursi besi / Metal	1 Unit	Baik
62	Meja Rapat	3 Buah	Baik
63	Meja Podium	2 Buah	Baik
64	Meja 1/2 Biro	14 Buah	1 Buah Rusak Berat, 13 Buah Baik
65	Kursi Rapat	102 Buah	5 Buah Rusak Berat, 97 Buah Baik
66	Kursi Tamu	1 buah	Rusak Berat
67	Kursi Putar	4 Buah	Kursi Putar 3 Buah Rusak Berat, 1 Buah Baik
68	Bangku Tunggu	1 Buah	Baik
69	Kursi Lipat	20 Buah	Baik
70	Meja Komputer	4 Buah	Baik
71	Sofa	2 Set	Baik
72	Mesin Pemotong Rumput	2 Unit	1 Unit Rusak Berat, 1 Unit Baik
73	Lemari Es	2 Buah	Baik
74	A.C. Window	2 Unit	1 Unit Ruak Berat, 1 Unit Baik
75	A.C. Split	9 Unit	Baik
76	Kipas Angin	7 buah	2 buah Rusak Berat, 4 buah Baik
77	Alat Dapur Lainnya	3 Buah	Baik
78	Televisi	1 Buah	Baik

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
79	Loudspeaker	2 Unit	Baik
80	Sound System	1 Unit	Baik
81	Wireless	1 Unit	Rusak Berat
82	Microphone	1 Unit	1 Unit Rusak Berat
83	Camera Film	1 Unit	Baik
84	Tustel	1 Unit	Rusak Berat
85	Tiang Bendera	1 Buah	Baik
86	Tangga Aluminium	1 Buah	Baik
87	Dispenser	3 Buah	1 Unit Rusak berat, 2 Buah Baik
88	Mimbar/Podium	3 Buah	Baik
89	Karpet	1 Buah	Baik
90	Gordyin/Kray	42 Buah	37 rusak Berat, 5 Baik
91	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	1 Unit	Baik
92	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	Baik
93	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 Buah	Baik
94	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6 Buah	Baik
95	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 Buah	Baik
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6 Buah	Baik
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2 Buah	Baik
98	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2 Buah	Baik
99	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	5 Buah	2 Buah Rusak Berat, 3 Buah Baik
100	Microphone/Wireless MIC	1 Unit	Baik
101	Digital Audio Taperecorder	1 Unit	Rusak Berat
102	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	1 Unit	Baik
103	Facsimile	1 Buah	Rusak Berat
104	Peralatan Antena Penerima vhf lainnya	1 Unit	Baik
105	Genset	1 Unit	Baik
106	Timbangan Badan	2 Buah	Baik
107	Ukur Tinggi Badan	2 Buah	Baik
108	Proyektion Polariscope	1 Unit	Baik
109	Lambang Negara (Garuda)	2 Buah	Baik
110	Gedung Kantor	1 Unit	Baik

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, kondisi barang milik daerah pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, sebagian besar aset masih dalam kondisi baik dan layak digunakan, meskipun terdapat sejumlah barang yang sudah mengalami kerusakan ringan maupun berat. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan aset yang lebih optimal melalui pemeliharaan rutin, rehabilitasi, serta pengadaan barang baru sesuai kebutuhan, agar sarana prasarana tetap mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan

1.5. ISU-ISU STRATEGIS

Kabupaten Luwu Timur sebagai daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan keberagaman etnis, memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, dinamika sosial yang ditimbulkan oleh pesatnya pertumbuhan sektor industri, mobilitas penduduk antarwilayah, serta perbedaan latar belakang budaya dan kepentingan politik turut menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas dan integrasi sosial.

Isu strategis diidentifikasi sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Secara umum terdapat beberapa masalah / isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

1. Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat Partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya belum optimal
2. Adanya potensi intoleransi dan radikalisme
3. Lemahnya pembinaan dan pengawasan ormas
4. Terjadinya konflik horizontal dan lemahnya sinergi dalam deteksi dini konflik
5. Belum optimalnya kemitraan dan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah
6. Rendahnya kepatuhan parpol dalam pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik
7. Belum optimalnya pengawasan terhadap WNA
8. Meningkatnya ancaman narkoba

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja yang memuat hal-hal sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum mengenai organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Renstra 2025 - 2029 tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target Indikator Kinerja Utama (IKU) lima tahun yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2026

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dari aspek

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan rencana anggaran yang akan digunakan dan yang anggaran telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah dan solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan instrumen yang digunakan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan realisasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP), serta menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis (Renstra), karena pada dasarnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra.

Perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol Tahun 2025-2029 yang disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2.1.1. Visi

Perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mengacu pada visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025 - 2029



Visi ini mengandung makna terwujudnya kemajuan daerah yang ditandai dengan tata kelola pemerintahan yang efektif, stabilitas sosial politik yang kondusif, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam mendukung visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam menjaga stabilitas politik daerah, meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat, memperkuat ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan, serta mencegah dan menangani potensi konflik sosial.

2.1.2. Misi

Perencanaan dan pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mengacu pada misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029, yaitu

1. Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan;
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital.

Pada periode ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengampu **Misi ke-1**, yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing. Peran Kesbangpol diwujudkan melalui penguatan pendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik, penanaman nilai kebangsaan, serta pencegahan potensi konflik sosial guna membentuk masyarakat yang berkualitas secara karakter dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun sebagai penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah. Tujuan disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar dalam penetapan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2025-2029.

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur

PERIODE TAHUN 2025 - 2029			
VISI	MISI	TUJUAN PD	SASARAN PD
Luwu Timur Maju dan Sejahtera	Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing (M-1)	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas daerah 2. meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada 3. Meningkatnya peran ormas dalam pembangunan daerah 4. meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel tersebut menunjukkan hubungan hierarkis antara visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur periode 2025 - 2029. Setiap komponen disusun secara berjenjang, dimulai dari visi sebagai arah pembangunan daerah, yang dijabarkan ke dalam misi, kemudian diturunkan menjadi tujuan perangkat daerah, dan dioperasionalkan melalui sasaran strategis yang terukur.

2.1.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menetapkan strategi dan kebijakan yang digambarkan pada table berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur

Periode Renstra Tahun 2025 - 2029			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas daerah 2. meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada 3. Meningkatnya peran ormas dalam pembangunan daerah 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sistem kewaspadaan dini dan sinergi lintas sektor dalam pencegahan serta penanganan konflik sosial. 2. Penguatan pendidikan politik dan fasilitasi demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan 3. Penguatan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan berbasis data dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan stabilitas daerah melalui deteksi dini, koordinasi terpadu, dan penguatan ketahanan nasional di daerah. 2. Mendorong partisipasi politik masyarakat yang sadar, cerdas, dan bertanggung jawab. 3. Mengembangkan sistem

Periode Renstra Tahun 2025 - 2029			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kolaborasi. 4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan digitalisasi sistem manajemen	pembinaan ormas yang tertib administrasi, aktif, dan berkontribusi terhadap persatuan bangsa. 4. Mewujudkan pengelolaan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sumber : Dokumen Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021 – 2026 dan Tahun 2025 - 2029

Pada periode 2025–2029, arah kebijakan berkembang menjadi lebih strategis dengan penekanan pada penguatan sistem kewaspadaan dini dan sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas daerah, penguatan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan peran organisasi kemasyarakatan, serta tata kelola berbasis kinerja dan digitalisasi. Perubahan ini mencerminkan peningkatan dari pendekatan pembinaan menuju penguatan sistem dan tata kelola yang lebih terintegrasi dan akuntabel.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan periode Renstra yang berlaku. Pada periode Renstra Tahun 2025–2029, Penetapan Kinerja disesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi yang lebih sistematis, yaitu penguatan stabilitas daerah, demokrasi yang inklusif, peran organisasi kemasyarakatan, serta tata kelola berbasis kinerja dan digitalisasi. Dengan demikian, kedua periode tersebut menunjukkan kesinambungan perencanaan sekaligus peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas daerah	Persentase Penurunan konflik IPOLEKSOSBUD	Persen	18,18	27,27	36,36	54,55	63,64
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Tingkat partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	Persen	80,35	80,35	80,35	80,35	81,50

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan daerah	Persentase ormas dalam pembangunan daerah	Persen	52	54	56	59	61
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	70 (BB)	70,50 (BB)	71 (BB)	71,50 (BB)	72 (BB)

Sumber Data : Dokumen IKU Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025 – 2029

Pada periode 2025–2029, sasaran strategis diarahkan pada peningkatan stabilitas dan kondusifitas daerah yang diukur melalui persentase penurunan konflik IPOLEKSOSBUD dengan target peningkatan yang progresif, peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada, peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang diukur melalui nilai SAKIP sesuai evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Secara keseluruhan, arah kebijakan menunjukkan kesinambungan pembangunan dengan penekanan pada stabilitas daerah, partisipasi masyarakat, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

2.3. STRATEGI PROGRAM DAN KEGIATAN

Setelah penetapan tujuan dan sasaran strategis, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi sebagai arah kebijakan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Strategi tersebut menjadi pedoman dalam menentukan program dan kegiatan yang relevan, terukur, dan selaras dengan indikator kinerja

Pada periode Renstra 2025–2029, strategi diarahkan secara lebih komprehensif pada peningkatan stabilitas dan kondusifitas daerah, penguatan peran organisasi kemasyarakatan, peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Strategi diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tetap konsisten, berkesinambungan, dan berorientasi pada hasil kinerja.

Tabel 2.4
Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PERIODE TAHUN 2025 - 2029			
SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1. Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas daerah	Persentase Penurunan konflik IPOLEKSOSBUD	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
1. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Tingkat partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	Program Peningkatan Peran Partai Politik, Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik
2. Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan daerah	Persentase ormas dalam pembangunan daerah	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			2. Administrasi keuangan perangkat daerah
			3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
			4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
			5. Administrasi umum perangkat daerah
			6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
			7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
			8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Bupati Luwu Timur selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja (PK)
Badan Kesbangpol Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas daerah	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	27.27%
2.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	80.35%
3.	Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Persentase peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	54.00%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.50 (BB)

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV
Tahun 2026

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Sekretaris			
I	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar	100%
1.	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi dengan baik	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100%
2.	Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat daerah sesuai standar	Persentase realisasi anggaran terhadap rencana	95%
3.	Terlaksananya administrasi BMD sesuai standar	Persentase data barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik	100%
4.	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan baik	Persentase dokumen kepegawaian yang terkelola sesuai standar	100%
5.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum yang selesai tepat waktu	100%
6.	Tersedianya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pengadaan barang yang sesuai dengan rencana kebutuhan	100%
7.	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan	100%
8.	Terpeliharanya BMD-PD dengan baik	Persentase barang milik daerah yang dipelihara secara berkala	100%
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan			
1.	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase partai politik yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui hibah daerah (%)	100%
		Persentase peningkatan pemahaman pendidikan politik dan pengembangan serta etika budaya politik kepada masyarakat (%)	100%
1.1	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Persentase capaian pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah (%)	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.2.1	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33 Orang
1.2.2	Terlaksananya koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	125 Orang
1.2.3	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	4 Laporan
2.	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas/Rumah Ibadah/kelompok terdaftar setiap tahun	100%
2.1	Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi ormas/rumah ibadah/kelompok	Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/kelompok yang terdaftar setiap tahun	150 kelompok
2.2.1	Terlaksananya kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing daerah	330 orang
2.2.2	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	4 laporan
Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
I.	Meningkatnya nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pemantapan dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%
1.1.	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang
1.2.	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah paskibraka	70 Orang
2.	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Dilaksanakan	100%
2.1.	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100%
2.1.1.	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	819 Orang
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangana Konflik			
1.	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan	89%
1.1.	Terlaksananya Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social	100%
1.1.1.	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	606 Orang

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.1.2.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan
1.1.3.	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Kasubag Perencanaan dan Keuangan			
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
3.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
4.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
5.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Org/Bln
6.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen
Kasubag Umum dan Kepegawaian			
1.	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan
2.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen
3.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang
4.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
6.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
7.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
8.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 dokumen
9.	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan
10.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
11.	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit
12.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit
13.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
14.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
15.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
16.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit
17.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 unit
18.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
19.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BADAN KESBANGPOL

Capaian kinerja organisasi merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyajian capaian kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan 1 Tahun 2026 berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Proses pengukuran tersebut didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Melalui pengukuran kinerja ini dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja Akuntabilitas Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Hasil pengukuran capaian kinerja organisasi selanjutnya disajikan dalam bentuk perbandingan antara target dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Terhadap capaian tersebut dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, baik faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun pengukuran

kinerja disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.2.

Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TARGET TW. 1	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	27,27%	Belum Ditargetkan	-	-
2.	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pilkada	80,35%	80,35%	80,35%	100%
3.	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan daerah	Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	54%	Belum diitargetkan	-	-
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,50 (BB)	Belum ditargetkan	-	-

SASARAN - 1

“ MENINGKATNYA STABILITAS DAN KONDUSIVITAS DAERAH “

➤ **ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS**

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2026 (TRIWULAN-I)

Tabel 3.3.

Capaian Indikator Sasaran I

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TARGET TW.1	REALISASI TW.1	PERSENTASE CAPAIAN
PERSENTASE PENURUAN KONFLIK IPOLEKSOSBUD	27,27%	Belum ditargetkan	-	-

Indikator Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD tahun 2026 ditargetkan sebesar 27,27% sebagai target tahunan. Pada Triwulan I belum terdapat realisasi yang dapat disajikan karena indikator ini bersifat outcome dan pengukurannya dilakukan secara kumulatif sepanjang tahun, sehingga persentase capaian belum dapat dihitung pada periode berjalan. Dengan demikian, penilaian kinerja terhadap indikator ini secara komprehensif baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

Adapun formula untuk mengukur capaian kinerja sasaran “meningkatnya stabilitas dan kondusifitas daerah” dengan indicator kinerja “persentase penurunan konflik IPOLEKSOSBUD” yaitu :

Formula mengukur capaian kinerja Indikator “**Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD**” yaitu :

$$\text{Persentase Penurunan Konflik (\%)} = \frac{K_0 - K_t}{K_0} \times 100\%$$

Keterangan :

- K₀ = Jumlah konflik pada tahun dasar
- K_t = Jumlah konflik pada tahun berjalan

2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2026 (TRIWULAN- I) DENGAN TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

Selanjutnya, target dan realisasi kinerja sasaran strategis **meningkatnya stabilitas dan kondusifitas daera** dengan indicator **Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD** tahun 2026 (triwulan 1) dengan beberapa tahun lalu dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 3.4

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN	TARGET TW.1	REALISASI TW. 1	CAPAIAN
Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas daerah	Persentase penurunan konflik ipoleksosbud	2024	Belum ditargetkan	-	-
		2026	Belum ditargetkan	-	-
		2026	Belum ditargetkan	-	-

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada sasaran meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah dengan indikator Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD, pada Triwulan I belum terdapat target, realisasi, maupun capaian yang dapat disajikan. Hal ini disebabkan indikator bersifat outcome yang pengukurannya memerlukan akumulasi dan verifikasi data kejadian konflik sepanjang tahun berjalan. Oleh karena itu, capaian kinerja belum dapat dihitung pada tahap awal, dan pengukuran indikator ini secara lebih akurat dilakukan pada akhir tahun atau pada Triwulan IV setelah seluruh data terkonsolidasi.

3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026 (TRIWULAN-1) DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026 Terhadap Target Jangka Menengah

SASARAN I : MENINGKATNYA STABILITAS DAN KONDUSIVITAS DAERAH						
INDIKATOR KINERJA SASARAN : "PERSENTASE PENURUNAN KONFLIK IPOLEKSOSBUD"	TARGET TAHUN 2026	TARGET TW-1 TAHUN 2026	REALISIASI TW-1 TAHUN 2026	REALISIASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RENSTRA 2029	
	27,27%	Belum ditargetkan	-	72,27%	63,64%	

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa, pada Triwulan I Tahun 2026, sasaran meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah dengan indikator persentase penurunan konflik IPOLEKSOSBUD belum ditetapkan target triwulanan sehingga capaian kinerja belum dapat diukur dan dibandingkan secara langsung dengan target jangka menengah. Namun demikian, apabila mengacu pada realisasi tahun 2025 sebesar 72,27%, capaian tersebut telah melampaui target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 63,64%, yang menunjukkan bahwa secara tren kinerja indikator ini berada pada kondisi yang cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian konflik berjalan cukup efektif, meskipun dipengaruhi oleh dinamika sosial politik yang fluktuatif. Meskipun demikian, pengukuran capaian tahun berjalan tetap memerlukan data kumulatif hingga akhir periode untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan representatif.

4. PERBANDINGAN DENGAN TARGET NASIONAL ATAU DAERAH LAIN

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Tabel 3.6

Perbandingan dengan Target Nasional/Daerah Lain

SASARAN I : MENINGKATNYA STABILITAS DAN KONDUSIVITAS DAERAH				
INDIKATOR KINERJA SASARAN :	TARGET TAHUN 2026	TARGET TW.1 TAHUN 2026	REALISASI TW. 1 TAHUN 2026	REALISASI NASIONAL ATAU DAERAH LAIN
"Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	27,27	Belum ditargetkan	-	Tidak Ada

Pada Triwulan I Tahun 2026, indikator Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD belum memiliki target triwulanan dan belum terdapat realisasi yang dapat disajikan, sehingga capaian kinerja pada periode tersebut belum dapat dihitung. Selanjutnya, perbandingan dengan target nasional maupun capaian daerah lain juga belum dapat dilakukan karena belum tersedia data pembanding yang relevan serta adanya perbedaan karakteristik dan dinamika konflik di masing-masing wilayah. Meskipun demikian, indikator ini secara substantif tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kondusivitas daerah sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Meskipun pada Triwulan I Tahun 2026 indikator Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD belum memiliki target dan realisasi sehingga capaian kinerja belum dapat diukur, namun secara kualitatif telah dilakukan berbagai upaya pendukung pencapaian kinerja

Beberapa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indicator Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD jika mengacu pada pencapaian tahun 2025 yaitu :

1. Optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam pemantauan kondisi sosial politik serta pencegahan konflik secara berkelanjutan;

2. Penguatan sistem deteksi dini konflik melalui pemetaan potensi konflik dan respons cepat terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat;
3. Terjalannya koordinasi dan sinergi yang efektif antara Kesbangpol, perangkat daerah terkait, Forkopimda, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan lainnya;
4. Pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan konflik melalui fasilitasi dialog, mediasi, dan pendekatan persuasif di tingkat masyarakat
5. Kondisi konflik yang bersifat fluktuatif namun dapat dikendalikan secara efektif melalui langkah antisipatif dan koordinatif yang tepat

Namun, dalam pencapaian kinerja ini tentunya masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

- a. Kondisi sosial politik yang dinamis dan bersifat fluktuatif.
- b. Potensi konflik dipengaruhi faktor eksternal di luar kewenangan Kesbangpol.
- c. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang belum merata.
- d. Data dan informasi konflik antarinstansi belum sepenuhnya terintegrasi.
- e. Koordinasi lintas sektor memerlukan waktu dan penyesuaian.
- f. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.
- g. Luas wilayah keragaman karakteristik daerah.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

1. Penguatan deteksi dini dan pemantauan potensi konflik.
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dengan Forkopimda dan perangkat daerah terkait.
3. Fasilitasi dialog dan mediasi dalam pencegahan konflik sosial.
4. Pembinaan organisasi kemasyarakatan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
5. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah.

6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik sumber daya sarana, prasarana maupun tenaga dalam menunjang pencapaian kinerja terhadap sasaran "Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah" maka dapat difasilitasi dengan meningkatkan koordinasi

yang intensif dengan forum-forum strategis yang telah terbentuk, memaksimalkan fungsi Tim Informan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Melakukan koordinasi lintas sectoral dan memasang papan himbauan untuk tetap menjaga kerukunan dan kedamaian dimasyarakat.

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target TW. 1	Realisasi Tw. 1	Capaian	Anggaran Tw. 1	Realisasi Tw.1	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Stabilitas dan kondusivitas daerah		Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	-	-	-	1.031.292.400	644.066.100	62,45%
	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	-	-	-	106,259,600	21,887,000	20.60%
	2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang dilaksanakan(%)	100%	100%	100%	302,179,200	29,005,500	9,60%
	3. Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan (%)	75	100%	133%	622,853,600	Rp593,173,600	95.23%

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.8

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Meningkatnya Stabilitas dan Kondusivitas Daerah	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	-	62,45	37,55%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja indikator “Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD” adalah 37,55%

7. ANALISIS PROGAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan menjadi tatanan yang mendasari kebudayaan masyarakat serta mencerminkan kepribadian masyarakat itu sendiri.

Tujuan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan semangat kecintaan terhadap tanah air.

Sasaran program ini adalah meningkatnya nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, dengan indikator kinerja berupa persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Pada Triwulan I Tahun 2026, indikator tersebut **belum ditetapkan target** sehingga capaian kinerja belum dapat diukur. Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formula sebagai berikut: Formula indikatornya adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Penguatan Ideologi Pancasila (\%)} = \frac{\text{Jumlah Peserta yang Meningkatkan Pemahamannya}}{\text{Dibagi Jumlah Peserta yang Disasar}} \times 100\%$$

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut :

1.1. Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Luwu Timur terhadap Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara.

Dengan indikator kinerja yaitu "Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Adapun formulasi yang digunakan adalah

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila (\%)} &= \text{Jumlah Kegiatan} \\ &\text{yang terlaksana} \mathbf{dibagi} \text{ Jumlah kegiatan yang direncanakan} \times 100\% \\ &= 2 \text{ kegiatan} / 2 \text{ kegiatan} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pada triwulan 1 tahun 2026 terealisasi sesuai dengan target dengan capaian kinerja 100%. Adapun kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan yaitu

1. Kegiatan sosialisasi dan pendataan siswa-siswi SMP dan SMA/ sederajat dalam rangka pelatihan dan pembinaan karakter bangsa;
2. Kegiatan rapat pendahuluan rangka pembukaan Seleksi anggota PASKIBRAKA Tahun 2026

Dokumentasi kegiatan



Dokumentasi : Rapat Pendahuluan Pembukaan Seleksi Paskibraka Tahun 2026



Dokumentasi : Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Siswa/Siswi Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Karakter Kebangsaan

Berikut table sub kegiatan yang mendukung program dan kegiatan

Table 3.

Capaian Kinerja Sub Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	TRIWULAN 1			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah peserta kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan, dan nilai-nilai kebangsaan	0	0	0	Pada triwulan 1 belum ditargetkan, namun telah dilaksanakan sosialisasi dan pendataan siswa SMP dan SMA sebagai tahap persiapan program persiapan untuk pelaksanaan pelatihan dan pembinaan karakter kebangsaan
2.	Pembentukan Paskibraka	Jumlah paskibraka	Jumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang terpilih, dilatih, dan dikukuhkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	0	0	0	Pada triwulan 1 belum ditargetkan, namun telah dilaksanakan rapat pendahuluan dalam rangka pembukaan pendaftaran PASKIBRAKA Tahun 2026

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sasaran kinerja program yaitu Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Dengan indikator Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Dilaksanakan..

Formula indikatornya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang EKOSOSBUD (\%)} &= \text{Jumlah} \\ &\text{Kebijakan yang Dilaksanakan} \text{ Dibagi Jumlah Kebijakan yang Ditargetkan} \times 100\% \\ &= 2 \text{ Kebijakan} / 2 \text{ kebijakan} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pada Triwulan 1, ditargetkan sebanyak 2 kebijakan di bidang EKOSOSBUD, dan seluruh target tersebut telah berhasil direalisasikan. Kebijakan yang dimaksud meliputi

1. SK Penetapan Hibah FKUB Tahun 2026
2. SK Tim Terpadu P4GN (Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba)

Yang keduanya telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Penetapan kedua kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan program di bidang sosial dan budaya, khususnya dalam penguatan kerukunan umat beragama serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dengan terealisasinya seluruh kebijakan yang ditargetkan, capaian kinerja pada Triwulan 1 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada periode ini berjalan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan, serta mencerminkan komitmen dalam memastikan aspek kebijakan sebagai landasan pelaksanaan program telah terpenuhi dengan baik. Keberhasilan ini juga menjadi dasar yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan lanjutan pada triwulan berikutnya.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut :

1.1. Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, social dan budaya

Indicator kegiatan Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya.

Adapun formulasi kegiatan yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan EKOSOSBUD} \\ (\%) &= \text{Jumlah Kegiatan yang terlaksana} \text{ dibagi } \text{Jumlah kegiatan yang} \\ &\text{direniskan} \times 100\% \\ &= 1 \text{ Kegiatan} / 2 \text{ Kegiatan} \times 100\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

Pada Triwulan I, ditargetkan 2 kegiatan yang akan dilaksanakan, namun hanya 1 (satu) kegiatan yang terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 50%. Kegiatan yang terlaksana adalah **Rapat Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Luwu Timur**. Sementara itu, kegiatan **Rapat Kerja Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)** belum dapat dilaksanakan karena adanya kendala teknis dan penjadwalan, sehingga direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Dokumentasi Kegiatan Rapat Kerja FKUB



Berikut table sub kegiatan yang mendukung program dan kegiatan

Table 3.

Capaian Kinerja Sub Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	TRIWULAN 1			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial. Budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan koordinasi bidang ketahanan social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	97 Orang	47 Orang	48,45%	<p>Pada Triwulan I ditargetkan 97 peserta dalam kegiatan koordinasi bidang ketahanan sosial, budaya, serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan kerukunan umat beragama. Namun, realisasi hanya mencapai 47 peserta melalui Rapat Kerja FKUB, sehingga capaian kinerja sebesar 48,45%.</p> <p>Sementara itu, kegiatan Rapat Kerja Tim Terpadu P4GN dengan rencana 50 peserta belum terlaksana karena kendala teknis dan penjadwalan, dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.</p>

3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerja program yaitu Persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan. Capaian kinerja pada triwulan 4 sebesar 100% dengan jumlah kejadian dan konflik yang terselesaikan sebanyak 20 kasus.

Pencapaian indikator program ini diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan (\%)} &= \text{Jumlah Konflik dan} \\ &\text{Kejadian yang Terselesaikan} \mathbf{Dibagi} \text{ Jumlah Konflik dan Kejadian yang Terdata} \\ &\times 100\% \\ &= 14 \text{ Kasus yang terselesaikan} / 14 \text{ kasus yang terdata} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pada Triwulan I, persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan dihitung berdasarkan total 14 kasus konflik dan kejadian yang terdata, dan seluruhnya berhasil diselesaikan. Dengan demikian, capaian indikator pada periode ini mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa penanganan konflik dan kejadian di daerah telah berjalan secara efektif, responsif, dan tepat waktu.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya dalam melakukan deteksi dini, langkah pencegahan, hingga penyelesaian konflik melalui pendekatan persuasif dan mediasi. Selain itu, dukungan sistem pelaporan dan pemantauan yang berjalan dengan baik juga turut mempercepat proses penanganan setiap kejadian yang muncul di masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan kondisi wilayah yang relatif kondusif serta kemampuan pengelolaan konflik yang semakin baik. Ke depan, upaya ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dalam memperkuat langkah antisipatif dan pencegahan dini, sehingga setiap potensi konflik dapat diminimalkan dan stabilitas sosial tetap terjaga secara berkelanjutan.. Berikut data konflik dan kejadian yang terdata periode Januari – Maret 2026

Table 3.

Data Konflik dan Kejadian (Januari – Maret 2026)

No	Jenis Kejadian	Waktu	Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian	Kerugian			Tindak Lanjut/Solusi
						Material	Korban Jiwa	Korban Luka	
1	Penemuan Mayat	03 Januari 2026	Atue	Malili	Penemuan mayat korban tenggelam di Desa Atue atas nama Sangkala	-	1 Orang	-	Jenasah telah diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan
2	Bencana Alam Kebakaran	08 Januari 2026	Nikkel	Nuha	Peristiwa kebakaran Toko Nunukan milik Adolfini di Desa Nikkel	10,000,000	-	-	Api telah dipadamkan oleh personil Pemadam Kebakaran
3	Penemuan Mayat	12 Januari 2026	Tarengge	Wotu	Penemuan mayat di persimpangan tiga tugu dua jari Tarengge depan halaman Mesjid Babul Jannah Tarengge	-	1 Orang	-	Korban telah dievakuasi dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan
4	Bencana Alam Kebakaran	17 Januari 2026	Laskap	Malili	Bencana alam kebakaran lahan gambut di Desa Laskap	-	-	-	Api telah dipadamkan oleh personil Pemadam Kebakaran
5	Aksi Unjuk Rasa (Demo)	19 Januari 2026	Tarengge	Wotu	Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Tana Luwu terkait tuntutan pemekaran Luwu Raya di Desa Tarengge	-	-	-	Telah dilakukan mediasi dan kesepakatan Pemerintah Daerah dan DPRD akan mendukung penuh rencana pemekaran tersebut

No	Jenis Kejadian	Waktu	Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian	Kerugian			Tindak Lanjut/Solusi
						Material	Korban Jiwa	Korban Luka	
		21 Januari 2026	Lagego	Burau	Aksi unjuk rasa terkait pemekaran Provinsi Luwu Raya di perbatasan Kab.Luwu Timur dan Kab.Luwu Utara	-	-	-	Setelah melakukan orasi para pengunjung rasa membubarkan diri
		02 Februari 2026	Mandiri	Tomoni	Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Perjuangan Rakyat Tanah Luwu terkait pemekaran Luwu Raya di Lapangan Tomoni	-	-	-	Para pengunjung rasa membubarkan diri setelah melakukan orasi terkait percepatan pemekaran Luwu Raya
		08 Februari 2026	Tarengge	Wotu	Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Perjuangan Rakyat Tanah Luwu terkait pemekaran Luwu Raya di depan terminal Desa Tarengge	-	-	-	Aksi dilakukan dari pagi hingga malam hari dengan berbagai rangkaian aksi mulai dari orasi hingga doa bersama
6	Pembunuhan	20 Januari 2026	Loeha	Towuti	Korban meninggal dunia akibat pendarangan di Desa Loeha	-	1 Orang	-	Telah diitangani oleh Polsek Towuti dan jenazah telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan
7	Bencana Alam Kebakaran	22 Januari 2026	Benteng	Burau	Kebakaran rumah milik Syamsir di Desa Benteng	150,000,000	-	-	Api telah dipadamkan oleh personil Pemadam Kebakaran

No	Jenis Kejadian	Waktu	Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian	Kerugian			Tindak Lanjut/Solusi
						Material	Korban Jiwa	Korban Luka	
8	Korban Meninggal Dunia	23 Januari 2026	Tawakua	Angkona	Korban meninggal dunia akibat tersengat listrik atas nama Juli di Desa tawakua	16,500,000	1 Orang	-	Jenasah telah diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan
9	Pelecehan Seksual	24 Februari 2026	Beringin Jaya	Tomoni	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	-	-	-	Korban sudah melapor pada Polsek Mangkutana dan pelaku telah diamankan
10	Pencurian	02 Maret 2026	Bayondo	Tomoni	Pencurian buah sawit milik PTPN XIV Apdeling Bayondo	250,000	-	-	Pelaku telah dilaporkan ke Pihak berwajib dan telah diamankan
11	Penganiayaan	08 Maret 2026	Cedana Hijau	Wotu	Tindak pidana penganiayaan dalam keluarga atas nama korban Ina Febrianti oleh pelaku Edi Setiawan yang merupakan kakak kandung korban	-	-	1 Orang	Korban telah melaporkan kejadian pada Polsek Wotu dan pelaku telah diamankan
12	Bencana Alam Angin Putting Beliung	08 Maret 2026	Burau Pantai	Burau	Bencana alam angin putting beliung yang terjadi di Burau Pantai	15 rumah	-	-	telah dilaporkan pada pihak Bencana dan Pemadam Kebakaran
13	Bencana Alam Kebakaran	15 Maret 2026	Ledu-ledu	Wasuponda	Bencana alam kebakaran rumah di Desa Ledu-ledu	190,000,000	-	-	Api telah dipadamkan oleh personil Pemadam Kebakaran
14	Aksi Unjuk Rasa (Demo)	26 Maret 2026	Malili	Malili	Aksi unjuk rasa oleh Alinasi mahasiswa dan pemuda luwu timur (AMPLI) di Pertigaan Islamic Center	-	-	-	Telah dilakukan mediasi terkait tuntutan aksi agar transparansi dalam penerimaan karyawan PT.IHIP

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut

1.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Indikator kegiatan yaitu Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social. Pada triwulan 1 terealisasi 100% dari target 100%.

Adapun formulasi kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan} \\ \text{Konflik (\%)} &= \text{Jumlah Kegiatan yang terlaksana} \text{ dibagi } \text{Jumlah kegiatan yang} \\ &\text{direncanakan} \times 100\% \\ &= 2 \text{ Kegiatan} / 2 \text{ kegiatan} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Triwulan I diukur dari 2 kegiatan yang direncanakan, yaitu Pelatihan Tim Informan dan Pemantauan Deteksi Dini Situasi Keamanan dan Ketertiban Daerah, yang seluruhnya telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100%; hal ini didukung oleh koordinasi yang baik dan pelaksanaan yang efektif, serta berkontribusi dalam meningkatkan kewaspadaan nasional dan menjaga kondisi wilayah tetap kondusif

Dokumentasi kegiatan



Dokumentasi : Pelatihan Tim Informan



Dokumentasi : Kegiatan Pemantauan



Berikut table sub kegiatan yang mendukung program dan kegiatan

Table 3.

Capaian Kinerja Sub Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	TRIWULAN 1			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	Jumlah peserta = Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan koordinasi bidang kewaspadaan dan penanganan konflik	56 Orang	56 Orang	100%	Terealisasi sesuai dengan target atau capaian 100%

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	TRIWULAN 1			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
2.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Laporan = Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kewaspadaan dan konflik	1 Laporan	1 Laporan	100%	Terealisasi sesuai dengan target atau capaian 100%
3.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen = Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forkopimda	1 Laporan	1 Laporan	100%	Terealisasi sesuai dengan target atau capaian 100%

SASARAN - 2

“MENINGKATNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PILKADA”

Sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada dengan indicator sasaran yaitu **tingkat partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA**. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara atau daerah, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan PEMILU dan PILKADA sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

❖ Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2026 (TRIWULAN 1)

Tabel 3.

Capaian Indikator Sasaran II

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TARGET TRIWULAN 1	REALISASI TRIWULAN 1	PERSENTASE CAPAIAN
Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA	80,35%	80,35%	80,35%	100%

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja triwulan I sebesar 82,39% dengan capaian kinerja 100%. Realisasi merupakan data numerik KPU Kabupaten Luwu Timur berdasarkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak (Pilpres dan Pileg) Bulan Februari Tahun 2024 sampai dengan tersedianya data resmi hasil Pemilu atau Pilkada berikutnya.

Pencapaian positif indicator sasaran Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal tersebut diperoleh dari formulasi :

$$TPPM (\%) = \frac{TPP \text{ Pemilu} + TPP \text{ Pilkada}}{2}$$

Keterangan :

- TPPM = Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
- TPP Pemilu = Tingkat partisipasi PEMILU
- TPP Pilkada = Tingkat partisipasi PILKADA

TPPM = (82,39% + 78,30%) / 2 Kegiatan
 Realisasi = 80,35%
 Capaian = 100%

Adapun Data partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak
(PILEG dan PILPRES) Tahun 2024

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL (SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH)	PERSENTASE (%)
1	Burau	25.316	20.478	240	20.718	81.84
2	Wotu	24.116	19.953	333	20.286	84.12
3	Tomoni	19.318	15.941	306	16.247	84.10
4	Tom-Tim	10.217	8.404.	92	8.496	83.16
5	Mangkutana	16.392	12.930	164	13.094	79.88
6	Kalaena	9.125	7.385	78	7.463	81.79
7	Angkona	18.244	14.919	311	15.230	83.48
8	Malili	30.587	24.910	366	25.276	82.64
9	Wasuponda	15.793	12.453	102	12.555	79.50
10	Towuti	31.968	26.879	313	27.192	85.06
11	Nuha	17.246	13.237	89	13.326	77.27
Total		218.322	177.489	2.394	179.883	82,39

Sumber : Bid. Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol dan KPU Kab. Luwu Timur

Tabel 3.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak
(Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur)

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL (SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH)	PERSENTASE (%)
1	Burau	25.398	19.881	308	20.189	79,49
2	Wotu	24.373	19.643	268	19.911	81,69
3	Tomoni	19.686	15.778	213	15.991	81,23
4	Tom-Tim	10.277	8.154	144	8.298	80,74
5	Mangkutana	16.537	12.456	169	12.625	76,34
6	Kalaena	9.067	7.221	117	7.338	80,93
7	Angkona	18.365	14.647	281	14.928	81,29
8	Malili	31.499	25.036	225	25.261	80,20
9	Wasuponda	15.853	11.904	142	12.046	75,99
10	Towuti	33.549	25.460	270	25.730	76,69
11	Nuha	17.416	11.452	173	11.625	66,75
Total		222.020	171.632	2310	173.942	78,30

Sumber : Bid. Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol dan KPU Kab. Luwu Timur

2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2026 (TRIWULAN-I) DENGAN TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026 (Triwulan I) dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN	TARGET TW.1	REALISASI TW. 1	CAPAIAN
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Tingkat partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA	2023	79,18	79,18	100%
		2024	80,05	80,35	100,37%
		2025	80,35	80,35	100%
		2026	80,25	80,25	100%

Dari table diatas dapat dijelaskan Indikator Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada menunjukkan perkembangan kinerja yang positif dan konsisten dalam mendukung peningkatan partisipasi politik masyarakat. Pada Tahun 2023, tingkat partisipasi pemilih tercatat sebesar 79,18% dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai

100%. Capaian ini menjadi dasar (baseline) dalam perencanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi di daerah.

Pada Tahun 2024, pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif serta Pilkada Serentak menjadi momentum penting dalam pengukuran indikator ini. Realisasi tingkat partisipasi pemilih mencapai 80,35%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,05%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,37%. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas upaya pembinaan politik, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, pada Tahun 2025 dan 2026, target indikator ditetapkan mengacu pada hasil pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, yaitu sebesar 80,35 persen. Dengan realisasi yang juga mengacu pada capaian tersebut, kinerja Tahun 2026 mencapai 100% dan menunjukkan terjaganya konsistensi partisipasi politik masyarakat meskipun tidak terdapat pelaksanaan Pemilu atau Pilkada pada tahun berjalan.

3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026 (TRIWULAN 1) DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.

Realisasi Kinerja Tahun 2026 (Tw.1) Terhadap Target Jangka Menengah

SASARAN II : MENINGKATNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PILKADA				
INDIKATOR KINERJA SASARAN : "TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU DAN PILKADA"	TARGET TAHUN 2026 (%)	TARGET TW. 1 TAHUN 2026 (%)	REALISIASI TRIWULAN 1 TAHUN 20256(%)	TARGET AKHIR RENSTRA 2029 (%)
	80,35	80,35	80,35	81,50

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian kinerja Sasaran II Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada pada triwulan 1 Tahun 2026 menunjukkan hasil yang sesuai dengan perencanaan. Target dan realisasi Tingkat Partisipasi Pemilih pada triwulan 1 Tahun 2026 sebesar 80,35%, sehingga capaian kinerja tahunan tercapai 100%. Pengukurannya bersifat periodik dan bergantung pada pelaksanaan Pemilu atau Pilkada.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 81,50%, capaian kinerja sampai dengan Tahun 2026 telah mencapai 98,58%. Meskipun capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mendekati target jangka menengah, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target akhir Renstra, khususnya melalui penguatan pendidikan politik, peningkatan literasi demokrasi masyarakat, serta sinergi dengan penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan terkait.

2. PERBANDINGAN DENGAN TARGET NASIONAL

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Tabel 3.

Perbandingan dengan Target Nasional/Daerah Lain

SASARAN II : MENINGKATNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PILKADA				
INDIKATOR KINERJA SASARAN : "TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU DAN PILKADA	TARGET TAHUN 2026 (%)	TARGET TRIWULAN 1 TAHUN 2026 (%)	REALISASI TRIWULAN 1 TAHUN 2026	REALISASI DAERAH LAIN
	80,35	80,35	80,35	79,79%

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2026 sebesar 80,35 persen, telah memenuhi target yang ditetapkan. Nilai tersebut bersumber dari hasil Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, mengingat indikator ini bersifat periodik.

Jika dibandingkan dengan realisasi tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Luwu Utara yang tercatat sebesar 79,79%, capaian Kabupaten Luwu Timur berada pada tingkat yang lebih tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Luwu Timur relatif lebih baik dibandingkan daerah pembanding, serta mengindikasikan efektivitas upaya pembinaan, sosialisasi, dan fasilitasi pendidikan politik masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait

3. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Beberapa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada yaitu :

- a. Menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait maupun partai politik dalam melaksanakan Pendidikan politik dimasyarakat;
- b. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki;
- c. Memaksimalkan jumlah personil yang ada dalam pembagian wilayah pemantauan dan pelaksanaan kegiatan

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Pendidikan politik;
- b. Minimnya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Ormas, LSM dan OKP serta kegiatan Pendidikan politik kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan tugas pemantauan situasi politik dimasyarakat

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

- a. Meningkatkan jalinan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya;
- b. Melakukan sosialisasi yang masif, terkait Pendidikan politik dimasyarakat;
- c. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan

4. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik sumber daya sarana, prasarana maupun tenaga dalam menunjang pencapaian kinerja terhadap sasaran “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum” maka dapat difasilitasi dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan dengan instansi terkait

dan partai-partai politik untuk melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik dimasyarakat.

Tabel 3.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Triwulan 1 Tahun 2026

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi Tw. 1	Capaian	Anggaran Tw. 1	Realisasi Tw.1	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA		Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA	80,35%	80,35%	100%	22,098,300	5,220,000	23,62%
	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui hibah daerah (%)	-	-	-	22,098,300	5,220,000	23,62%

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA	80,35	23,62	76,38

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja indicator "Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA " adalah 76,38%

5. ANALISIS PROGAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Sasaran kinerja program yaitu Meningkatnya etika dan budaya politik. Program ini memiliki 2 (dua) indicator kinerja yaitu :

1. Persentase partai politik yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui hibah dana
2. Persentase peningkatan pemahaman pendidikan politik dan pengembangan serta etika budaya politik kepada masyarakat

Pada triwulan 1, program ini program ini belum ditargetkan. Target kinerja pada triwulan 2.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

1.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Dengan indicator kinerja yaitu Persentase capaian pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah.

Adapun formulasi yang digunakan adalah

$$\begin{aligned} \text{Persentase Capaian Pelaksanaan Dibidang Politik (\%)} &= \text{Jumlah Kegiatan} \\ &\text{yang Terlaksana Dibagi Jumlah Kegiatan yang Direncanakan X 100\%} \\ &= 1 \text{ kegiatan} / 1 \text{ kegiatan} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Persentase capaian pelaksanaan di bidang politik pada Triwulan I mencapai 100 persen, yang ditunjukkan dari terealisasinya 1 kegiatan sesuai dengan rencana, yaitu pemantauan situasi politik daerah; capaian ini mencerminkan pelaksanaan program yang berjalan efektif dalam mendukung stabilitas dan kondusivitas politik di daerah.

Berikut table sub kegiatan yang mendukung program dan kegiatan

Table 3.

Capaian Kinerja Sub Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	TRIWULAN 1			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah Peserta = Jumlah peserta kegiatan pelaksanaan kebijakan bidang politik	-	-	-	Pada triwulan 1 belum ditargetkan
2.	Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah Peserta = Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan koordinasi bidang politik	-	-	-	Pada triwulan 1 belum ditargetkan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	TRIWULAN 1			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
3.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah Laporan = Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%	Terealisasi sesuai dengan target atau capaian 100%

SASARAN - 3

“MENINGKATNYA PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH”

Sasaran Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja persentase peran ormas dalam pembangunan daerah. Indikator ini digunakan untuk menilai kontribusi ormas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

Capaian indikator menunjukkan efektivitas pembinaan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan. Hasil capaian ini mencerminkan tingkat partisipasi ormas dalam pembangunan daerah serta menjadi acuan penting untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan daerah.

❖ Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2026 (TRIWULAN IV)

Tabel 3.

Capaian Indikator Sasaran III

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TARGET TRIWULAN 1	REALISASI TRIWULAN 1	PERSENTASE CAPAIAN
persentase peran ormas dalam pembangunan daerah	54%	Belum ditargetkan	-	-

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator persentase peran organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pembangunan daerah dihitung pada akhir tahun karena indikator ini bersifat kumulatif dan membutuhkan akumulasi hasil pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh dalam satu tahun anggaran. Penilaian terhadap peran ormas tidak dapat dilakukan secara parsial per triwulan, melainkan harus didasarkan pada keseluruhan kontribusi, keterlibatan, serta dampak yang dihasilkan sepanjang tahun.

Selain itu, pengukuran indikator ini memerlukan data yang lengkap dan diverifikasi dari berbagai kegiatan dan program yang melibatkan ormas, sehingga lebih tepat dievaluasi setelah seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan. Oleh karena itu, target tidak ditetapkan pada Triwulan I dan

capaian kinerja baru dapat dihitung secara akurat pada akhir tahun, ketika seluruh komponen pendukung indikator telah terpenuhi.

Formula mengukur capaian kinerja yaitu :

$$\text{Persentase Ormas (\%)} = \frac{\text{ORMAS}_{\text{AKTIF}}}{\text{ORMAS}_{\text{TERDAFTAR}}} \times 100\%$$

Keterangan :

- $\text{ORMAS}_{\text{AKTIF}}$ = Jumlah keseluruhan ormas yang aktif dalam pembangunan
- $\text{ORMAS}_{\text{TERDAFTAR}}$ = Jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan memiliki SKT/terverifikasi pada pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol.

2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I DENGAN TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Triwulan IV) dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN	TARGET TW.1	REALISASI TW.1	CAPAIAN
Meningkatnya Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	Persentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah	2023	-	-	-
		2024	-	-	-
		2025	-	-	-
		2026	-	-	-

Indikator Persentase Peran Ormas dalam Pembangunan Daerah merupakan indikator baru dalam Renstra 2025–2029. Pada tahun 2025 telah ditetapkan target tahunan sebesar 52% dan terealisasi 54,48%, sehingga melampaui target. Sementara itu, pada tahun 2026 khususnya Triwulan I belum ditetapkan target, sehingga realisasi dan capaian belum dapat diukur. Hal ini karena indikator bersifat kumulatif dan pengukurannya dilakukan pada akhir tahun (Triwulan IV).

3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026 (TRIWULAN 1) DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.

Realisasi Kinerja Tahun 2026 (Tw.1) Terhadap Target Jangka Menengah

SASARAN III : MENINGKATNYA PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DSLAM PEMBANGUNAN DAERAH				
INDIKATOR KINERJA SASARAN :	TARGET TAHUN 2026 (%)	TARGET TW. 1 TAHUN 2026 (%)	REALISASI TW. 1 TAHUN 2026 (%)	TARGET AKHIR RENSTRA 2029 (%)
"PERSENTASE PERAN ORMAS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	54	-	-	61

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa Sasaran III yaitu meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah diukur melalui indikator persentase peran ormas. Pada tahun 2026 ditetapkan target sebesar 54% dengan target akhir Renstra 2029 sebesar 61%. Namun, pada Triwulan I Tahun 2026 belum ditetapkan target triwulanan sehingga realisasi dan capaian belum dapat diukur, mengingat indikator ini bersifat kumulatif dan dievaluasi pada akhir tahun anggaran.

Namun jika mengacu pada realisasi tahun 2025 sebesar 54,48% dari target 52% yang telah melampaui target tidak hanya menunjukkan kinerja yang positif, tetapi juga menjadi acuan penting dalam mendukung pencapaian target jangka menengah. Capaian tersebut memberikan baseline yang kuat bagi tahun 2026 sekaligus memperkuat arah pencapaian target Renstra hingga tahun 2029.

4. PERBANDINGAN DENGAN TARGET NASIONAL

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Tabel 3.

Perbandingan dengan Target Nasional/Daerah Lain

SASARAN III : MENINGKATNYA PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH				
INDIKATOR KINERJA SASARAN :	TARGET TAHUN 2026 (%)	TARGET TW. 1 TAHUN 2026 (%)	REALISASI TW.1 TAHUN 2026	REALISASI DAERAH LAIN
"PERSENTASE PERAN ORMAS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	54%	-	-	Tidak Ada

Berdasarkan tabel tersebut, Sasaran III yaitu meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah diukur melalui indikator persentase peran ormas dengan target tahun 2026 sebesar 54%. Namun, pada Triwulan I Tahun 2026 belum ditetapkan target triwulanan sehingga realisasi dan capaian kinerja belum dapat diukur. Hal ini disebabkan karena indikator bersifat kumulatif dan penilaiannya dilakukan pada akhir tahun anggaran setelah seluruh kegiatan yang melibatkan peran ormas terlaksana.

Selain itu, pada kolom realisasi daerah lain tercantum “tidak ada”, yang menunjukkan bahwa Hingga saat ini, belum terdapat data nasional atau perbandingan resmi dari daerah lain terkait indikator serupa, sehingga belum bisa dibandingkan secara kuantitatif dengan daerah lain atau target nasional.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Meskipun pada triwulan 1 belum ditetapkan target kinerja, namun telah dipetakan beberapa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator Persentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah yaitu :

- a. Pembinaan dan koordinasi rutin oleh Kesbangpol.
- b. Program pemberdayaan Ormas yang terstruktur.
- c. Peningkatan kesadaran Ormas dan masyarakat.
- d. Dukungan administratif dari pemerintah daerah.
- e. Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan keterlibatan Ormas.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini tentunya masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

- a. Keterbatasan kapasitas Ormas – SDM dan sumber daya yang terbatas.
- b. Koordinasi yang belum merata – Beberapa Ormas kurang terintegrasi dalam program pembangunan.
- c. Kesadaran partisipasi berbeda – Tidak semua Ormas termotivasi untuk aktif.
- d. Kendala administratif – Proses pendaftaran atau perizinan masih menjadi hambatan.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

- a. Sosialisasi – Meningkatkan kesadaran Ormas melalui sosialisasi dan rapat

- koordinasi
- b. Fasilitasi Administratif – Mempermudah proses pendaftaran, dan akses informasi bagi Ormas.
- c. Monitoring dan Evaluasi – Melakukan pemantauan berkala untuk menyesuaikan strategi dan memastikan partisipasi Ormas efektif

6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik sumber daya sarana, prasarana maupun tenaga dalam menunjang pencapaian kinerja terhadap sasaran “Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Daerah” maka dapat difasilitasi dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan dengan instansi terkait dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kontribusi dan perannya dalam pembangunan daerah .

Tabel 3.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target TW. 1	Realisasi Tw. 1	Capaian	Anggaran s/d Tw. 1	Realisasi s/d tw-1	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Daerah		Persentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah	-	-	-	27,393,700	-	-
	1. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas/Rumah Ibadah/kelompok terdaftar setiap tahun (%)	100%	100%	100%	27,393,700	-	-

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Daerah	Persentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah	100%	0%	0%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisensi anggaran terhadap pencapaian kinerja indicator “*Persentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah* ” adalah 0%. Realisasi terhadap anggaran 0% atau belum ada dikarenakan spj yang mendukung pencapaian realisasi keuangan masih dalam proses keuangan atau pencairan.

7. ANALISIS PROGAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sasaran program yaitu Meningkatkan ketertiban organisasi kemasyarakatan. Dengan indikator Persentase Ormas/Rumah Ibadah/kelompok terdaftar setiap tahun. Pada triwulan 1 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% atau capaian kinerja 100%

Formulasi untuk mengukur capaian kinerja program ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok (\%)} &= \text{Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok yang Terdaftar} \div \text{Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok yang terdata} \times 100\% \\
 &= 34 \text{ Kelompok terdaftar} \div 34 \text{ Kelompok terdata} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Persentase Ormas, rumah ibadah, dan kelompok masyarakat yang terdaftar di Kabupaten Luwu Timur mencapai 100%, karena seluruh 34 kelompok yang terdata pada triwulan 1 telah resmi terdaftar. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pendataan dan registrasi kelompok masyarakat

telah dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, sehingga tidak ada kelompok yang terlewat. Kondisi ini sangat penting karena pendaftaran resmi menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, koordinasi, dan pemberdayaan Ormas maupun kelompok lainnya secara lebih efektif. Selain itu, data yang lengkap memudahkan pemerintah dalam perencanaan program pembangunan, penyaluran bantuan, serta pengawasan kegiatan, sehingga keterlibatan Ormas dan kelompok masyarakat dalam pembangunan daerah dapat lebih optimal. Pencapaian 100% ini juga menjadi indikator bahwa keterlibatan seluruh kelompok masyarakat di Luwu Timur dalam sistem administrasi resmi telah terjamin, sebagai langkah awal yang kuat untuk meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

1.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sasaran kegiatan yaitu Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi ormas/rumah ibadah/kelompok. Sampai pada Triwulan 1 jumlah ormas/rumah ibadah/kelompok yang terdaftar sebanyak 34 kelompok, dengan target yang hanya 30 kelompok atau capaian 113%. Hal ini juga dipengaruhi tingginya minat kelompok masyarakat, seperti rumah ibadah, kelompok tani, nelayan, dan lembaga lain, untuk mendaftar agar memperoleh bantuan atau hibah dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan sistem pendaftaran berjalan efektif dan membantu penyaluran dukungan secara tepat sasaran.

Adapun formulasi kegiatan yaitu :

Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok terdaftar = Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok terdaftar
Target = 30 Kelompok Realisasi = 34 Kelompok
Capaian = 113%

Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Ormas/LSM/Klp Tani/Rumah Ibadah



Berikut table sub kegiatan yang mendukung program dan kegiatan

Table 3.

Capaian Kinerja Sub Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	TRIWULAN 1			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah orang yang mengikuti kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Peserta = Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelaksanaan kebijakan bidang ormas	60 Orang	0 Orang	0	Target belum terealisasi karena Surat Keputusan (SK) Tim Terpadu Pengawasan Ormas sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan masih dalam proses penyelesaian.
2.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Laporan = Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang ormas	1 laporan	1 laporan	100%	Terealisasi sesuai target

SASARAN 4

“ MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH “

➤ **Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Sasaran strategis ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi di setiap organisasi pemerintah dan termasuk dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan utama dari peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, khususnya pelayanan SKPD, adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, ditetapkan indikator kinerja berupa Nilai SAKIP, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas, kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja SKPD. Dengan demikian, pencapaian sasaran ini tidak hanya menunjukkan kinerja organisasi yang terukur, tetapi juga menjadi dasar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2026 (TRIWULAN 1)

Tabel 3.

Capaian Indikator Sasaran IV

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TARGET TRIWULAN 1	REALISASI TRIWULAN 1	PERSENTASE CAPAIAN
Nilai Sakip	70,50 (BB)	Belum ditargetkan	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2026, indikator kinerja Nilai SAKIP belum dapat disajikan capaian kerjanya karena belum terdapat penetapan target antara (triwulanan) serta belum tersedia hasil penilaian dari Inspektorat sebagai evaluator. Nilai SAKIP merupakan indikator yang pengukurannya tidak dilakukan secara periodik triwulanan, melainkan melalui evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja, yang dilaksanakan dalam satu siklus tahun anggaran. Oleh karena itu, pada Triwulan I belum terdapat realisasi yang dapat

dibandingkan dengan target tahunan sebesar 70,50 (kategori BB), sehingga persentase capaian belum dapat dihitung. Capaian indikator ini baru dapat diketahui setelah proses evaluasi resmi oleh Inspektorat pada akhir periode pelaporan.

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026 (TW. 1) DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Selanjutnya, perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2026 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	TARGET	REALISASI (n-1)	KATEGORI	CAPAIAN KINERJA
Nilai Sakip	Nilai	2023	69	77,95	BB	112,97
		2024	77,95	78,95	BB	101,28
		2025	70	78,65	BB	112%
		2026	70,50	Belum Ada	-	-

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 nilai SAKIP sebesar 77,95 dengan capaian 112,97% dari target 69 (kategori BB), menunjukkan kinerja melampaui target. Tahun 2024 meningkat menjadi 78,95 dengan capaian 101,28% dari target 77,95 dan tetap berada pada kategori BB, yang mencerminkan kinerja stabil. Pada tahun 2025, realisasi menggunakan data tahun sebelumnya (n-1) yaitu 78,65 dengan capaian 112% dari target 70 (kategori BB), sebagai data sementara karena hasil evaluasi tahun berjalan belum tersedia. Sementara itu, tahun 2026 belum memiliki data realisasi karena penilaian SAKIP oleh Inspektorat dilakukan secara tahunan dan hasilnya baru ditetapkan pada akhir tahun anggaran. Secara keseluruhan, kinerja SAKIP menunjukkan tren stabil dan konsisten pada kategori BB.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2026 (TW.1) DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.

Realisasi Kinerja Tahun 2026 (Tw.1) Terhadap Target Jangka Menengah

SASARAN IV: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				
INDIKATOR KINERJA SASARAN : "NILAI SAKIP"	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISIASI TW. 1 TAHUN 2026 (%)	REALISIASI TW. 1 TAHUN 2026 (%)	TARGET AKHIR RENSTRA 2029 (%)
	70,50 (BB)	-	-	72,50 (BB)

Pada Triwulan I Tahun 2026, indikator kinerja Nilai SAKIP belum dapat disajikan capaian realisasinya karena belum terdapat penetapan target triwulanan maupun hasil penilaian dari Inspektorat pada periode berjalan, sehingga kolom realisasi dan persentase capaian masih belum terisi. Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebesar 70,50 (kategori BB) sebagai bagian dari sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Sementara itu, dalam perspektif jangka menengah, target akhir Renstra Tahun 2029 ditetapkan sebesar 72,50 (kategori BB), yang menunjukkan adanya arah peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja secara bertahap. Dengan demikian, capaian Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dievaluasi secara kuantitatif dan baru akan diketahui setelah proses penilaian SAKIP oleh Inspektorat dilakukan secara tahunan pada akhir tahun.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional atau Daerah Lain

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Tabel 3.

Perbandingan dengan Target Nasional/Daerah Lain

SASARAN IV : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				
INDIKATOR KINERJA SASARAN : "NILAI SAKIP"	TARGET TAHUN 2026	TARGET TW. 1 TAHUN 2026	REALISIASI TW. 1 TAHUN 2026	REALISIASI DAERAH LAIN
	70,50	-	-	73,06

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Sasaran IV menekankan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang diukur

melalui Nilai SAKIP. Untuk tahun 2026, target ditetapkan sebesar 70,50 (kategori BB), sedangkan pada Triwulan I belum terdapat target triwulanan maupun realisasi karena belum ditargetkan. Oleh karena itu, capaian Triwulan I belum dapat dihitung secara kuantitatif.

Dengan demikian belum dapat dibandingkan dengan daerah lain, meskipun dari table tersebut terdapat realisasi dari daerah lain yaitu kesbangpol kabupaten Purbalingga sebesar 73,06 (berdasar data tahun 2025). Namun jika dibandingkan dengan realisasi kesbangpol Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 (n-1) sebesar 78,65. Capaian itu lebih tinggi 5,59 point. Hal ini menegaskan bahwa kinerja Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur berada di atas rata-rata daerah lain dan konsisten mempertahankan kualitas manajemen kinerja yang baik, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi SAKIP dibandingkan OPD sejenis.

5. ANALISIS PENINGKATAN/PENURUNAN DILAKUKAN	PENYEBAB KINERJA	KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI	ATAU YANG DILAKUKAN
---	------------------	--	---------------------

Secara keseluruhan dari tahun ke tahun capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terhadap sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD menunjukkan predikat baik, hal ini disebabkan beberapa factor :

1. Badan Kesbangpol telah memiliki Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah periode 2025 - 2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan target jangka menengah;
2. Telah disusun RKT, Perjanjian dan Rencana Aksi dan telah selaras dengan Renstra;
3. Pemberdayaan SDM / Aparatur yang cukup maksimal sehingga mendukung kelancaran operasional kantor.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Evaluasi resmi kinerja tahun berjalan belum dilakukan, sehingga capaian masih menggunakan data tahun sebelumnya.
2. Pegawai yang terbatas atau kurang pengalaman dalam penyusunan laporan SAKIP dan manajemen kinerja.

3. Terkadang data program/kegiatan belum lengkap atau belum terintegrasi sehingga menyulitkan analisis kinerja secara tepat waktu
4. Pembatasan anggaran untuk kegiatan monitoring, evaluasi, atau peningkatan kapasitas SDM dapat mempengaruhi pencapaian kinerja
5. Adanya perubahan aturan di tingkat pusat/daerah yang memerlukan penyesuaian cepat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya:

1. Menyelaraskan semua dokumen perencanaan sampai tingkat bawah dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja seperti perjanjian kinerja sampai jenjang staf dan menyusun indikator kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atau triwulan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan rapat internal. Dengan adanya rapat ini maka dapat dilakukan pencegahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya;
3. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
4. Mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan asistensi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

- Pemanfaatan Anggaran Tepat Sasaran – Anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas sesuai Rencana Kerja Tahunan, sehingga capaian SAKIP melebihi target.
- Efisiensi Sarana dan Prasarana – Penggunaan sarana kerja, dokumen, dan teknologi informasi difokuskan untuk mendukung pengelolaan kinerja
- Optimalisasi SDM – Pegawai memanfaatkan waktu dan kapasitas kerja secara efektif, dengan penugasan berbasis kompetensi

- Pemanfaatan Data untuk Pengambilan Keputusan – Data dan dokumentasi digunakan untuk evaluasi dan penyesuaian strategi agar sumber daya diarahkan ke kegiatan yang memberikan hasil optimal

Tabel 3.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi Tw. 1	Capaian	Anggaran Tw. 1	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah		Nilai Sakip	-	-	-	1,385,562,885	716,691,722	51,71
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan Perangkat Daerah yang berjalan sesuai standar(%)	100%	100%	100%	1,385,562,885	716,691,722	51,71

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program	Indikator	% Realisasi Kinerja Tw-1	% Realisasi Anggaran Tw-1	% Tingkat efisiensi Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan Perangkat Daerah yang berjalan sesuai standar(%)	-	51,71%	39,29%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisensi anggaran terhadap pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang merupakan adalah 39,29%

7. ANALISIS PROGAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran "**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**" pada triwulan 1 terdiri dari 1 (satu) program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota

Sasaran program yaitu Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi. Indikator program adalah Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar. Target yang ditetapkan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada triwulan 1 Tahun 2026 adalah yaitu 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Formulasi mengukur capaian program :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Penunjang Urusan (\%)} &= \text{Jumlah kegiatan penunjang sesuai standar} \\ &\text{Dibagi Total kegiatan penunjang} \times 100\% \\ &= 7 \text{ kegiatan} / 7 \text{ Kegiatan} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, persentase kegiatan penunjang urusan mencapai 100%, karena seluruh kegiatan penunjang yang dilaksanakan yaitu 7 kegiatan dari 7 kegiatan yang ditargetkan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penunjang telah berjalan secara lengkap, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut juga mencerminkan efektivitas pengelolaan program serta optimalnya dukungan kegiatan penunjang dalam mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah. Dengan capaian 100%, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan penunjang telah terlaksana sesuai rencana dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.

Program ini didukung 7 kegiatan dan 27 sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Triwulan -1			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Kinerja (%) = Jumlah Target Kinerja Tercapai Dibagi Jumlah Target Kinerja ditetapkan X 100%	100%	100%	100%	100%	Terealisasi sesuai dengan target
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	2 Dok	-	-	-	Belum ditargetkan
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKP (Dokumen)	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	-	-	-	Belum ditargetkan
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKP (Dokumen)	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	Terealisasi sesuai dengan target yaitu tersusunya 1 dokumen DPA POKOK Tahun 2026

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Triwulan - 1			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	
1.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi laporan kinerja perangkat daerah (Laporan)	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	10 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Terealisasi sesuai dengan target. Tersusunnya 4 laporan evaluasi kinerja yaitu : 1 laporan evaluasi RKPD Tw.4 Tahun 2025; 1 laporan evaluasi kinerja tw.4 tahun 2025; 1 LAKIP 2025; dan 1 LKPJ 2025
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran terhadap rencana	$\text{Persentase Realisasi Anggaran (\%)} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dibagi Total Anggaran yang Direncanakan}}{100\%} \times 100\%$	95%	20%	23,24%	116,2%	Melampaui dari target kinerja, sebesar 603,886,854 anggaran yang terealisasi dari target 2,584,319,301 (anggaran tahunan)
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 Org/Bln	24 Org/Bln	24 Org/Bln	100%	Terealisasi sesuai dengan target

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Triwulan - 1			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD)	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 Laporan	5 Laporan	5 laporan	100%	Terealisasi sesuai dengan target. Tersusunnya laporan keuangan yaitu : 3 laporan bulanan, 1 laporan triwulan; dan 1 laporan CALK
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase data barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik	Persentase Administrasi Aset (%) = Jumlah Aset Teradministrasi Dibagi Jumlah Aset Keseluruhan X 100%	100%	100%	100%	100%	Terealisasi sesuai dengan target (semua aset teradministrasi dengan baik)
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun tepat waktu	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Terealisasi sesuai target
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang dikelola sesuai standar	Persentase Administrasi Kepegawaian (%) = Jumlah Dokumen Kepegawaian sesuai standar Dibagi Jumlah Dokumen Kepegawaian Keseluruhan X 100%	100%	25%	25%	100%	Terealisasi sesuai dengan target (tersusunnya 1 dokumen kepegawaian sesuai standar)

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Triwulan - 1			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	
4.1	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	Terealisasi sesuai target
4.2	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	2 Orang	1 Orang	50%	Terealisasi 1 orang yang mengikuti bimtek yaitu bimtek kewaspadaan dini
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang selesai tepat waktu	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu (%) = Jumlah Layanan Administrasi Tepat Waktu Dibagi Jumlah Layanan Administrasi Keseluruhan X 100%	100%	100%	100%	100%	Terealisasi sesuai target
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	Terealisasi sesuai target
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	33,33%	Terealisasi hanya 1 paket yaitu pengadaan peralatan lainnya (kalkulator), sedangkan 2 paket lainnya yaitu

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Triwulan - 1			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	
								pengadaan printer dan alat peraga latihan masih dalam proses belanja e-catalog
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (Paket)	Jumlah paket bahan logistic yang disediakan	4 Paket	1 paket	1 paket	100%	Terealisasi sesuai target
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	Terealisasi sesuai target
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Dokumen	15 Dokumen	15 dokumen	100%	Terealisasi sesuai target
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Terealisasi sesuai target
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	3 laporan	100%	Terealisasi sesuai target

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Triwulan - 1			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang yang sesuai dengan rencana kebutuhan (%)	Persentase Kesesuaian (%) = Jumlah Barang sesuai kebutuhan Dibagi Jumlah Barang yang diadakan X 100%	100%	Belum ditargetkan	-	-	Belum ditargetkan
6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	18 unit	Belum ditargetkan	-	-	Belum ditargetkan
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	Belum ditargetkan	-	-	Belum ditargetkan
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintahan	Persentase Kesesuaian Penyediaan Jasa = Jumlah Jasa Sesuai Kebutuhan Dibagi Jumlah Jasa yang Disediakan X 100%	100%	100%	100%	100%	Terealisasi sesuai target
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	Terealisasi sesuai target
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Terealisasi sesuai target

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Triwulan - 1			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	Terealisasi sesuai target
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara secara berkala(%)	$\text{Persentase Pemeliharaan Barang (\%)} = \frac{\text{Jumlah Barang yang Dipelihara}}{\text{Jumlah Barang Keseluruhan}} \times 100\%$	100%	28%	52,38%	54,92	Jumlah barang yang dipelihara sebanyak 8 unit dari target 15 unit. Capaian ini disesuaikan dengan kondisi riil barang yang tersedia untuk dipelihara, karena kegiatan pemeliharaan bersifat fleksibel mengikuti kebutuhan dan kondisi aset pada periode berjalan.
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	4 unit	4 unit	100%	Terealisasi sesuai target yaitu 1 unit kendaraan dinas roda 4; 3 unit kendaraan dinas roda 2
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit	10 Unit	4 unit	40%	Terealisasi 4 unit peralatan dan mesin yang dipelihara yaitu : 2 unit Ac; 2 unit laptop

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Triwulan - 1			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	
8.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	Belum ditargetkan	-	-	Belum ditargetkan
8.4	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 Unit	0 Unit	0%	Pemeliharaan dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana gedung kantor yang akan dipelihara.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2026 yaitu sebesar **Rp. Rp10,887,676,506,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah)**. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 1 sebesar **Rp1,365,977,822,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) atau 55,38% berdasarkan anggaran kas dan 12,55% berdasarkan anggaran tahunan**. Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2026

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN SAMPAI TRIWULAN I	REALISASI ANGGARAN SAMPAI TRIWULAN I (BERDASARKAN SP2D)			TOTAL SISA ANGGARAN	
	Rp	Rp	Rp	% TRIWULAN	% TAHUNAN	Rp	%
BELANJA OPERASIONAL	10,887,676,506	2,466,347,285	1,365,977,822	55.38	12.55	9,521,698,684	87.45
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2,950,438,200	106,259,600	21,887,000	20.60	0.74	2,928,551,200	99.26
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2,950,438,200	106,259,600	21,887,000	20.60	0.74	2,928,551,200	99.26
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	285,225,600	23,254,000	7,320,000	31.48	2.57	277,905,600	97.43
Pembentukan Paskibraka	2,665,212,600	83,005,600	14,567,000	17.55	0.55	2,650,645,600	99.45
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,199,892,265	22,098,300	5,220,000	23.62	0.44	1,194,672,265	99.56

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN SAMPAI TRIWULAN I	REALISASI ANGGARAN SAMPAI TRIWULAN I (BERDASARKAN SP2D)			TOTAL SISA ANGGARAN	
	Rp	Rp	Rp	% TRIWULAN	% TAHUNAN	Rp	%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	1,199,892,265	22,098,300	5,220,000	23.62	0.44	1,194,672,265	99.56
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,140,358,765	10,344,000	5,220,000	50.46	0.46	1,135,138,765	99.54
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45,156,500	2,590,000	-	-	-	45,156,500	100.00
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14,377,000	9,164,300	-	-	-	14,377,000	100.00
Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan	180,788,900	27,393,700	-	-	-	180,788,900	100.00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	180,788,900	27,393,700	-	Rp -	Rp -	180,788,900	100.00
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	142,818,400	10,469,400	-	0	0	142,818,400	100.00

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN SAMPAI TRIWULAN I	REALISASI ANGGARAN SAMPAI TRIWULAN I (BERDASARKAN SP2D)			TOTAL SISA ANGGARAN	
	Rp	Rp	Rp	% TRIWULAN	% TAHUNAN	Rp	%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	37,970,500	16,924,300	-	0	0	37,970,500	100.00
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	674,190,200	302,179,200	29,005,500	9.60	4.30	645,184,700	95.70
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	674,190,200	302,179,200	29,005,500	9.60	4.30	645,184,700	95.70
Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	674,190,200	302,179,200	29,005,500	9.60	4.30	645,184,700	95.70
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitai Penanganan Konflik Sosial	2,443,325,600	622,853,600	593,173,600	95.23	24.28	1,850,152,000	75.72
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2,443,325,600	622,853,600	593,173,600	95.23	24.28	1,850,152,000	75.72
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelejen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,Serta Penanganan Konflik Sosial	321,987,000	71,047,000	56,652,000	79.74	17.59	265,335,000	82.41
Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kejasama intelejen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan,Serta Penanganan Konflik di Daerah	14,550,700	2,930,700	2,750,700	93.86	18.90	11,800,000	81.10
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2,106,787,900	548,875,900	533,770,900	97.25	25.34	1,573,017,000	74.66

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN SAMPAI TRIWULAN I	REALISASI ANGGARAN SAMPAI TRIWULAN I (BERDASARKAN SP2D)			TOTAL SISA ANGGARAN	
	Rp	Rp	Rp	% TRIWULAN	% TAHUNAN	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,439,041,341	1,385,562,885	716,691,722	51.73	20.84	2,722,349,619	79.16
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65,552,700	23,616,200	6,000,550	25.41	9.15	59,552,150	90.85
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28,464,100	10,908,800	3,090,300	28.33	10.86	25,373,800	89.14
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,636,500	1,514,000	-	-	-	4,636,500	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,477,000	1,360,500	1,334,250	98.07	53.87	1,142,750	46.13
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,975,100	9,832,900	1,576,000	16.03	5.26	28,399,100	94.74
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,643,277,801	1,179,462,975	614,367,654	52.09	23.24	2,028,910,147	76.76
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,584,319,301	1,162,943,685	603,886,854	51.93	23.37	1,980,432,447	76.63
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	58,958,500	16,519,290	10,480,800	63.45	17.78	48,477,700	82.22
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21,052,000	8,516,000	800,000	9.39	3.80	20,252,000	96.20
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	21,052,000	8,516,000	800,000	9.39	3.80	20,252,000	96.20
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70,164,000	27,981,200	7,737,834	27.65	11.03	62,426,166	88.97
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	30,134,000	10,051,200	-	-	-	30,134,000	100.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	40,030,000	17,930,000	7,737,834	43.16	19.33	32,292,166	80.67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	415,359,340	101,437,410	67,473,055	66.52	16.24	347,886,285	83.76
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,190,740	2,547,685	-	-	-	10,190,740	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,680,000	11,680,000	-	-	-	90,680,000	100.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,624,100	3,444,025	3,381,300	98.18	24.82	10,242,800	75.18
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,713,000	2,928,250	950,000	32.44	8.11	10,763,000	91.89
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,760,000	1,460,000	1,030,000	70.55	11.76	7,730,000	88.24
Fasilitas Kunjungan Tamu	19,800,000	3,600,000	1,980,000	55.00	10.00	17,820,000	90.00

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN SAMPAI TRIWULAN I	REALISASI ANGGARAN SAMPAI TRIWULAN I (BERDASARKAN SP2D)			TOTAL SISA ANGGARAN	
	Rp	Rp	Rp	% TRIWULAN	% TAHUNAN	Rp	%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260,591,500	75,777,450	60,131,755	79.35	23.08	200,459,745	76.92
Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38,150,000	-	-	#DIV/0!	0	38,150,000	100.00
Pengadaan Mebel	26,150,000	-	-	#DIV/0!	0	26,150,000	100.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,000,000	-	-	#DIV/0!	0	12,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109,745,500	22,529,100	16,600,129	73.68	15.13	93,145,371	84.87
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,285,500	944,100	130,000	13.77	5.69	2,155,500	94.31
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44,100,000	11,025,000	7,970,129	72.29	18.07	36,129,871	81.93
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63,360,000	10,560,000	8,500,000	80.49	13.42	54,860,000	86.58
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75,740,000	22,020,000	3,712,500	16.86	4.90	72,027,500	95.10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24,000,000	6,000,000	2,462,500	41.04	10.26	21,537,500	89.74
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	20,840,000	6,020,000	1,250,000	20.76	6.00	19,590,000	94.00
Pemeliharaan/Rehablitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,900,000	-	-	#DIV/0!	-	20,900,000	100.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000	10,000,000	-	-	-	10,000,000	100.00
TOTAL	10,887,676,506	2,466,347,285	1,365,977,822	55.38	12.55	9,521,698,684	87.45

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN

TRIWULAN 1 TAHUN 2026

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2026 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)	
				I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	3,439,041,341	100	713,601,422	-	-	-	-	-	-	713,601,422	0.00%	20.75%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	65,552,700	100	2,910,250	-	-	-	-	25	2,910,250	25.00%	4.44%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	2	28,464,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	4,636,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2,477,000	1	1,334,250	-	-	-	-	1	1,334,250	50.00%	53.87%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2026 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)	
				I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	29,975,100	4	1,576,000							4	1,576,000	40.00%	5.26%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran terhadap rencana Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	95	2,643,277,801	23	614,367,654							23	614,367,654	24.46%	23.24%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	2,584,319,301	24	603,886,854							6	603,886,854	25.00%	23.37%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	58,958,500	5	10,480,800							5	10,480,800	27.78%	17.78%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase data barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik (1)	100	21,052,000	100	800,000							100	800,000	100.00%	3.80%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	21,052,000	1	800,000							1	800,000	25.00%	3.80%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2026 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)	
				I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang dikelola sesuai standar (1)	100	70,164,000	25	7,737,834		-		-		-	25	7,737,834	25.00%	11.03%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	30,134,000	1	-							1	-	25.00%	0.00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	40,030,000	1	7,737,834							1	7,737,834	25.00%	19.33%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang selesai tepat waktu (1)	100	415,359,340	100	67,473,055		-		-		-	100	67,473,055	100.00%	16.24%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	10,190,740	1	-							1	-	25.00%	0.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	90,680,000	1	-							1	-	20.00%	0.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	13,624,100	1	3,381,300							1	3,381,300	25.00%	24.82%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2026 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)	
				I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	11,713,000	1	950,000							1	950,000	25.00%	8.11%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	8,760,000	15	1,030,000							15	1,030,000	25.00%	11.76%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	19,800,000	1	1,980,000							1	1,980,000	25.00%	10.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	260,591,500	3	60,131,755							3	60,131,755	25.00%	23.08%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang sesuai dengan rencana kebutuhan (1)	100	38,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	18	26,150,000	-	-							-	-	0.00%	0.00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	12,000,000	-	-							-	-	0.00%	0.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan (1)	100	109,745,500	100	16,600,129	-	-	-	-	-	-	100	16,600,129	100.00%	15.13%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2026 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)	
				I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	2,285,500	1	130,000							1	130,000	25.00%	5.69%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	44,100,000	1	7,970,129							1	7,970,129	25.00%	18.07%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	63,360,000	1	8,500,000							1	8,500,000	25.00%	13.42%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara secara berkala (1)	100	75,740,000	15	3,712,500							15	3,712,500	15.38%	4.90%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	24,000,000	4	2,462,500							1	2,462,500	25.00%	10.26%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	34	20,840,000	4	1,250,000							4	1,250,000	11.76%	6.00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2026 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)		
				I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	20,900,000	-	-							-	-	0.00%	0.00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10,000,000	-	-							-	-	0.00%	0.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												24.24%	20.75%			
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%) (%)	100	2,950,438,200	-	21,887,000							-	-	21,887,000	0.00%	0.74%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	2,950,438,200	100	21,887,000							-	100	21,887,000	100.00%	0.74%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2026 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)	
				I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	50	285,225,600	-	7,320,000							-	7,320,000	0.00%	2.57%
Pembentukan Paskibraka	*Jumlah Paskibraka (Orang)	70	2,665,212,600	-	14,567,000							-	14,567,000	0.00%	0.55%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													0.00%	0.74%	
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang melaksanakan Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui hibah daerah (%) (%)	100	1,199,892,265	-	5,220,000							-	5,220,000	0.00%	0.44%
	Persentase peningkatan pemahaman pendidikan politik dan pengembangan serta etika budaya	100		-								-		0.00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2026 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)	
				I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	politik kepada masyarakat (%) (%)														
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase capaian pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah (%)	100	1,199,892,265	100	5,220,000	-	-	-	-	-	-	100	5,220,000	100.00%	0.44%
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	33	1,140,358,765	-	5,220,000							-	5,220,000	0.00%	0.46%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2026 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)	
				I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)														
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	125	45,156,500	-	-							-	-	0.00%	0.00%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	4	14,377,000	1	-							1	-	25.00%	0.00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2026 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)	
				I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)														
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.30%	0.44%
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/Rumah Ibadah/kelompok terdaftar setiap tahun (%) (%)	100	180,788,900	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/kelompok yang terdaftar setiap tahun (Kelompok)	150	180,788,900	34	-	-	-	-	-	34	-	-	-	22.67%	0.00%
Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	330	142,818,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2026 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)	
				I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	4	37,970,500	1	-							1	-	25.00%	0.00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										5.25%	0.00%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Dilaksanakan (%)	100	674,190,200	100	29,005,500								29,005,500	0.00%	4.30%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya (%)	100	674,190,200	50	29,005,500							50	29,005,500	50.00%	4.30%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2026 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)	
				I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	819	674,190,200	47	29,005,500							47	29,005,500	5.74%	4.30%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													5.74%	4.30%	
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan (%)	89	2,443,325,600	100	593,173,600								593,173,600	0.00%	24.28%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social (%)	100	2,443,325,600	100	593,173,600							100	593,173,600	100.00%	24.28%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2026 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)	
				I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	606	321,987,000	56	56,652,000							56	56,652,000	9.24%	17.59%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	4	14,550,700	1	2,750,700							1	2,750,700	25.00%	18.90%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2026 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)	
				I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
serta Penanganan Konflik di Daerah															
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	2,106,787,900	1	533,770,900							1	533,770,900	25.00%	25.34%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												22.92%	24.28%		
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		10,887,676,506	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											13.28%	12.52%
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											Sangat Rendah	Sangat Rendah

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja triwulan 1 tahun 2026 merupakan laporan kinerja triwulan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat.

Penyajian data laporan kinerja ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sesuai dengan RENSTRA tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur triwulan 1 Tahun 2026 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum hasil analisis pencapaian indicator kinerja sasaran strategis OPD, mencapai target yang ditetapkan;
2. Dari sisi pencapaian akuntabilitas keuangan, tingkat capaian realisasi keuangan tahun 2026 sebesar **Rp10,887,676,506,-** (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 1 sebesar

Rp1,365,977,822,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) **atau 55,38%** berdasarkan anggaran kas **dan 12,55%** berdasarkan anggaran tahunan,-

3. Terdapat beberapa sub kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan

4.2. SARAN/REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur ke depan, maka ada beberapa rekomendasi, antara lain :

1. Percepatan realisasi anggaran;
2. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
3. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi berjenjang terhadap perjanjian kinerja
5. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang tertuang dalam KAK dan anggaran kas yang telah ditetapkan
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral
7. Memperkuat komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya.